

## **Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat**

### ***Stakeholders Analysis on the Management of Danau Sentarum National Park Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan***

**Emi Roslinda<sup>1\*</sup>, Dudung Darusman<sup>2</sup>, Didik Suharjito<sup>2</sup>, dan Dodik Ridho Nurrochmat<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia

<sup>2</sup>Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor,  
Jalan Lingkar Akademik, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia

**Diterima 5 Maret 2012/Disetujui 7 Mei 2012**

#### ***Abstract***

*Danau Sentarum National Park (DSNP) is one protected area having vital roles in supporting the community livelihood of Kapuas Hulu Regency and West Kalimantan Province. Unfortunately, its presence is currently threatened due to various activities and overlapping interests. Hence, the management of DSNP could not be carried out by a single institution, requiring the support of other institutions. A possible approach was to conduct Stakeholders Analysis. This study analyzed stakeholders interests on DSNP management. The study was conducted in DSNP and respondents were selected using snowball sampling. There were 18 stakeholders identified as being involved in the management of DSNP of which 5 were classified as subject, 1 as key player, 6 as context setter, and 6 as crowd. There were 3 relationships between each stakeholder that were identified, that of conflict, complementary, and cooperation. Generally, the identified stakeholders played roles consistent with their main tasks and function. However, to better manage DSNP, synchronization among stakeholders was still necessary.*

*Keywords: Danau Sentarum National Park, conservation areas, stakeholders, management*

#### ***Abstrak***

*Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu dan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Namun, keberadaan TNDS terancam karena berbagai aktivitas dan kepentingan. Pengelolaan TNDS tidak dapat hanya dilakukan oleh 1 lembaga saja, tapi perlu didukung oleh lembaga lain yang berkepentingan. Pendekatan yang mungkin dapat dilakukan adalah analisis pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepentingan dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan TNDS. Responden yang digunakan dalam penelitian di TNDS dipilih dengan metode snowball sampling. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan TNDS sebanyak 18 yang terdiri atas 5 pemangku kepentingan sebagai subjek, 1 pemangku kepentingan sebagai pemain kunci (key player), 6 pemangku kepentingan sebagai context setter, dan 6 pemangku kepentingan sebagai crowd. Terdapat 3 hubungan yang terjadi di antara pemangku kepentingan, yaitu potensial konflik, saling mengisi, dan kerjasama. Secara umum, pemangku kepentingan yang teridentifikasi memiliki peran masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun, dalam pengelolaan TNDS perlu dilakukan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan tersebut agar dapat dicapai tujuan pengelolaan TNDS yang lebih baik.*

*Kata kunci: Taman Nasional Danau Sentarum, area konservasi, pemangku kepentingan, pengelolaan*

*\*Penulis untuk korespondensi, email: eroslinda71@gmail.com, telp. +62-81345243971*

## Pendahuluan

Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) merupakan salah satu kawasan konservasi di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di hulu sungai Kapuas ( $\pm 700$  km dari muara sungai Kapuas/Pontianak). TNDS ( $\pm 132.000$  ha) terdiri atas sekumpulan danau musiman (23%) dan beberapa formasi hutan rawa ( $\pm 49\%$ ) yang unik dan kaya akan keanekaragaman hayati (Giesen & Aglionby 2000). Selain itu, di dalam kawasan terdapat juga beberapa bukit yang merupakan habitat dari hutan meranti (*Shorea* sp.) dan hutan kerangas.

TNDS merupakan salah satu ekosistem lahan basah yang penting di Indonesia, bahkan di dunia, yang sejak tahun 1994 tercatat dalam situs Ramsar. Hal ini membuktikan adanya pengakuan masyarakat internasional terhadap lahan basah tersebut yang penting bagi pelestarian keanekaragaman hayati. TNDS berfungsi sebagai bendungan alam yang berfungsi sebagai persediaan air tawar pada musim kemarau dan pencegah banjir di musim hujan, penyeimbang keadaan iklim setempat, menjaga kestabilan ekosistem di sekitarnya, pengatur mutu dan banyaknya air bagi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, habitat berbagai jenis fauna dan flora, dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.

Saat ini kawasan TNDS telah mengalami kerusakan dan degradasi lingkungan yang cukup parah terutama disebabkan oleh berbagai jenis kegiatan manusia di dalam dan sekitar kawasan. Kawasan TNDS setiap tahunnya selalu mengalami kebakaran hutan. Sejak tahun 1973–2009 luasan areal yang terbakar lebih dari 27.000 ha (Balai TNDS 2011). Kebakaran hutan yang terjadi disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor gejala alam dan faktor kelalaian manusia.

Sumber daya alam TNDS telah dimanfaatkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun. Sampai saat ini di dalam kawasan TNDS terdapat lebih dari 45 dusun permanen dan 10 dusun musiman yang letaknya tersebar atau terpecah ke seluruh bagian kawasan. Jumlah penduduk yang tinggal di dalam kawasan berfluktuasi sepanjang tahun karena ada sebagian nelayan yang datang ke kawasan hanya selama puncak musim menangkap ikan. Jumlah penduduk menetap saat ini sekitar 1.835 kepala keluarga atau lebih kurang 9.000 jiwa. Saat puncak musim menangkap ikan, jumlah tersebut akan bertambah dengan drastis hingga 11.000–12.000 jiwa.

Meningkatnya aktivitas masyarakat dalam menangkap ikan pada musim kemarau akan memperbesar peluang tingkat kebakaran yang terjadi (Balai TNDS 2011). Kerusakan ekosistem TNDS juga diperparah oleh kegiatan penebangan kayu ilegal, pembukaan lahan secara besar-besaran untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan penangkapan ikan secara berlebihan di danau (Balai TNDS 2011). Kerusakan yang terjadi juga mengancam kehidupan masyarakat, baik yang tinggal di dalam kawasan TNDS berupa berkurangnya jumlah dan jenis ikan yang dapat ditangkap, juga seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu berupa bencana banjir saat musim hujan seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 2010, dan juga masyarakat Provinsi Kalimantan Barat saat musim kemarau berupa bencana kekeringan.

Upaya mengurangi laju degradasi dan memulihkan kondisi ekosistem kawasan TNDS telah dilakukan, baik oleh

Balai TNDS, Pemda Kapuas Hulu, kelompok masyarakat, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat. Tetapi usaha tersebut belum memperlihatkan hasil yang cukup signifikan. Belum berhasilnya usaha yang dilakukan dikarenakan kurangnya koordinasi antarpihak yang berkepentingan dengan kawasan TNDS. Masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan masing-masing. Untuk itu, perlu dilakukan analisis pemangku kepentingan yang dapat mengaktifkan informasi dan perspektif dari berbagai sumber sehingga dapat menyediakan basis pengetahuan yang lebih kuat dalam membangun inisiatif pengembangan atau pengelolaan sumber daya alam (Olsson *et al.* 2004). Penelitian ini bertujuan mendapatkan bentuk-bentuk hubungan antarpihak yang berkepentingan terhadap TNDS melalui analisis kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan di kawasan TNDS sehingga dapat terwujud pengelolaan TNDS yang lebih baik.

## Metode

Penelitian yang dilakukan di TNDS Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat ini bersifat deskriptif dan dilaksanakan pada bulan September–Desember 2011. Metode analisis pemangku kepentingan yang digunakan dalam penelitian berasal dari Reed *et al.* (2009). Metode ini merupakan salah satu metode yang telah dikembangkan dalam beberapa disiplin ilmu bersama-sama metode lainnya, yaitu Schmeer (2000) dan Varvasovzky dan Brugha (2000). Analisis pemangku kepentingan diterapkan untuk mengungkapkan kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan, memahami sinergi dan konflik antarpemangku kepentingan, dan memahami permintaan pemangku kepentingan terhadap fungsi dan jasa ekosistem dari TNDS. Reed *et al.* (2009) menyatakan bahwa analisis pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan cara: (1) mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingannya, (2) mengelompokkan dan mengategorikan pemangku kepentingan, dan (3) menyelidiki hubungan antarpemangku kepentingan.

Data dan informasi dikumpulkan menggunakan metode wawancara semi terstruktur dan berpedoman pada daftar topik yang telah disusun sebelumnya. Data dan informasi tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Identifikasi pemangku kepentingan dan kepentingannya menggunakan metode *snow-ball sampling* yaitu penentuan responden didasarkan atas pemangku kepentingan lainnya.

Analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan penafsiran matriks kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan terhadap pengelolaan TNDS. Penyusunan matriks tersebut dilakukan berdasarkan deskripsi pertanyaan responden yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (skor) dan dikelompokkan menurut kriteria pengaruh dan kepentingan dari pemangku kepentingan. Penetapan skoring didasarkan atas pertanyaan yang digunakan dalam mengukur tingkat kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan. Prosedur tersebut merupakan hasil modifikasi model yang dikembangkan oleh Abbas (2005), yaitu pengukuran data berjenjang 5 (Tabel 1). Nilai skor dari 5 pertanyaan dijumlahkan dan nilainya dipetakan dalam bentuk matriks kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan.

Tabel 1 Ukuran kuantitatif terhadap kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan

Skor	Nilai	Kriteria	Keterangan
<b>Kepentingan pemangku kepentingan</b>			
5	21–25	Sangat tinggi	Sangat mendukung pengelolaan TNDS
4	16–20	Tinggi	Mendukung pengelolaan TNDS
3	11–15	Cukup tinggi	Cukup mendukung pengelolaan TNDS
2	6–10	Kurang tinggi	Kurang mendukung pengelolaan TNDS
1	0–5	Rendah	Tidak mendukung pengelolaan TNDS
<b>Pengaruh pemangku kepentingan</b>			
5	21–25	Sangat tinggi	Sangat mempengaruhi pengelolaan TNDS
4	16–20	Tinggi	Mempengaruhi pengelolaan TNDS
3	11–15	Cukup tinggi	Cukup mempengaruhi pengelolaan TNDS
2	6–10	Kurang tinggi	Kurang mempengaruhi pengelolaan TNDS
1	0–5	Rendah	Tidak mempengaruhi pengelolaan TNDS

Analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan penafsiran matriks kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan terhadap pengelolaan TNDS menggunakan *grid* pemangku kepentingan yang dibuat menggunakan bantuan program *Microsoft Excel*. Hasil penentuan nilai/angka pada setiap indikatornya disandingkan satu sama lainnya sehingga membentuk koordinat. Posisi kuadran dapat menggambarkan ilustrasi posisi dan peranan yang dimainkan oleh masing-masing pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan TNDS yang menurut REDD *et al.* (2009) dikategorikan sebagai:

- 1 *Key players*, merupakan pemangku kepentingan yang aktif karena mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek.
- 2 *Context setters*, memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan sehingga dapat menjadi risiko yang signifikan untuk dipantau.
- 3 *Subjects*, merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan walaupun mendukung kegiatan tetapi kapasitas terhadap dampak mungkin tidak ada. Pemangku kepentingan ini dapat menjadi berpengaruh jika membentuk aliansi dengan pemangku kepentingan lainnya.
- 4 *Crowd*, merupakan pemangku kepentingan yang memiliki sedikit kepentingan dan berpengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya, dilakukan penyelidikan hubungan antarpemangku kepentingan secara deskriptif dan digambarkan dalam matriks *actor-linkage*. Pemangku kepentingan yang teridentifikasi disajikan dalam baris dan kolom tabel untuk menggambarkan hubungan antarpemangku kepentingan. Kata kunci yang digunakan dalam menggambarkan hubungan tersebut adalah berkonflik, saling mengisi, dan bekerjasama (Reed *et al.* 2009).

## Hasil dan Pembahasan

**Identifikasi pemangku kepentingan** Pemangku kepentingan merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan (Fletcher *et al.* 2003) yang diidentifikasi dengan pertimbangan posisi penting dan

pengaruh yang dimiliki. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan TNDS teridentifikasi sebanyak 18 pihak (Tabel 2).

BTNDS merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan TNDS. Ditinjau dari struktur organisasi Kementerian Kehutanan, keberadaan BTNDS (dari sisi geografis/lokasi) tidak berada di bawah dinas kehutanan provinsi, tetapi merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan. Balai merupakan institusi yang bertanggung jawab penuh untuk mengelola TNDS sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya BTNDS telah membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga lain yang mempunyai misi kelestarian TNDS. Kerjasama kemitraan dalam pengelolaan kawasan Danau Sentarum telah dilakukan sejak kawasan ini berstatus suaka margasatwa.

Pemangku kepentingan lainnya adalah pihak pemerintah daerah, dalam hal ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan di TNDS seperti badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA), dinas perkebunan dan kehutanan, dinas perikanan, dan dinas kebudayaan dan pariwisata. Semua pemangku kepentingan tersebut merupakan perpanjangan tangan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan misi daerah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2003–2012 yaitu ”menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten konservasi di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pengembangan ekowisata yang harmonis dengan agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan daerah tertinggal”.

Terdapat 4 kelompok masyarakat yang bermukim di sekitar TNDS, yaitu masyarakat Melayu, Iban, Kantuk, dan Embaloh. Terdapat satu Asosiasi *Periau* Danau Sentarum (APDS) beranggotakan masyarakat yang mengusahakan madu hutan di TNDS yang biasa disebut *periau*. *Periau* merupakan penduduk di sekitar danau sejak turun temurun mengelola madu hutan dalam organisasi tradisional yang mempunyai aturan-aturan dan wilayah pengelolaan.

Tabel 2 Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan TNDS

Pemangku kepentingan	Keterangan
Balai Taman Nasional Danau Sentarum (BTNDS)	Pemerintah
BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu	Pemerintah
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu	Pemerintah
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu	Pemerintah
Nelayan/Melayu	Masyarakat
Dayak Iban	Masyarakat
Dayak Kantuk	Masyarakat
Dayak Embaloh	Masyarakat
Asosiasi <i>Periau</i> Danau Sentarum (APDS)	Masyarakat
Riak Bumi	Lembaga swadaya masyarakat
<i>World Wide Fund for Nature &amp; Heart of Borneo</i> (WWF & HOB) Indonesia	Lembaga swadaya masyarakat
Flora Fauna Indonesia (FFI)	Lembaga swadaya masyarakat
Yayasan Titian	Lembaga swadaya masyarakat
<i>People Resources and Conservation Foundation</i> (PRCF) Indonesia	Lembaga swadaya masyarakat
CANOPY Indonesia	Lembaga swadaya masyarakat
Universitas Tanjungpura (UNTAN)	Lembaga penelitian
<i>Center for International Forestry Research</i> (CIFOR)	Lembaga penelitian

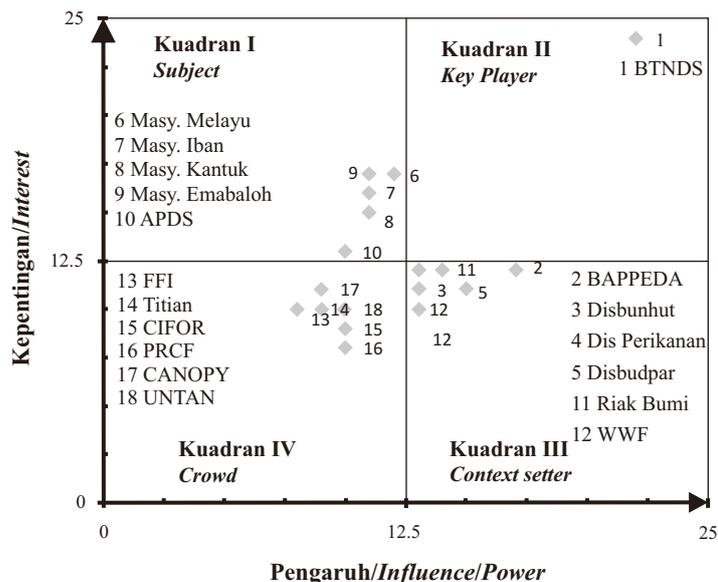
Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah lama berperan serta dalam kegiatan pengelolaan di TNDS, seperti Riak Bumi dan *World Wide Fund for Nature* (WWF) Indonesia. Riak Bumi merupakan LSM lokal (Kalimantan Barat) yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam komunitas dan bekerja bersama masyarakat di dalam dan sekitar TNDS. Fokus utama Riak Bumi pada kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas masyarakat di TNDS. WWF merupakan salah satu lembaga internasional nonprofit yang ikut serta dalam kegiatan pengelolaan di TNDS. Fokus utama WWF di TNDS pada kegiatan pengelolaan koridor TNDS dengan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) serta program *Heart of Borneo* (HOB). Lembaga lain yang juga teridentifikasi adalah Flora Fauna Indonesia (FFI) dan Yayasan Titian yang bekerjasama dalam pengawasan perdagangan ilegal fauna dan flora lintas negara. *People Resources and Conservation Foundation* (PRCF) Indonesia fokus pada kegiatan konservasi buaya senyulong dan fasilitator kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat. CANOPY Indonesia berperan dalam mendukung pengolahan bahan promosi TNDS. Semuanya merupakan pemangku kepentingan yang mempunyai kepentingan dan pengaruh rendah.

Universitas Tanjungpura (UNTAN) dan *Center for International Forestry Research* (CIFOR) merupakan lembaga penelitian yang aktif terlibat dalam penelitian di TNDS. UNTAN merupakan perguruan tinggi negeri di Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Pontianak. UNTAN melakukan berbagai kegiatan penelitian mengenai sumber daya alam di kawasan TNDS, kegiatan praktik lapang, dan penelitian atau ekspedisi ilmiah bagi mahasiswa. Fokus kegiatan CIFOR pada penelitian pengembangan sumber perekonomian masyarakat dan penelitian lainnya.

**Pengelompokan dan kategorisasi pemangku kepentingan** Sundawati dan Sanudin (2009) mengelompokkan pemangku kepentingan menjadi pemangku kepentingan primer (utama), pemangku

kepentingan sekunder (pendukung), dan pemangku kepentingan kunci. Reed *et al.* (2009) mengelompokkan pemangku kepentingan berdasar pengaruh dan kepentingannya sebagai *subjects*, *key players*, *crowd*, dan *context setters*. *Subject* memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah. Walaupun mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Pemangku kepentingan ini dapat menjadi berpengaruh jika membentuk aliansi dengan pemangku kepentingan lainnya. *Key players* merupakan pemangku kepentingan yang aktif karena mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek. *Crowd* merupakan pemangku kepentingan yang memiliki sedikit kepentingan dan berpengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. *Context setter* memiliki pengaruh yang tinggi tapi sedikit kepentingan sehingga dapat menjadi risiko signifikan untuk dipantau. Pada Gambar 1 disajikan matriks kepentingan dan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan.

Posisi kuadran I (*subject*) ditempati oleh masyarakat yang tinggal di dalam/sekitar TNDS, yaitu masyarakat Melayu, Iban, Kantuk, Embaloh, dan APDS yang juga beranggotakan masyarakat yang tinggal di dalam/sekitar TNDS. Hal ini berarti bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang tinggi terhadap sumber daya alam yang ada di TNDS, namun memiliki pengaruh yang kurang tinggi. Tampaknya pengaruh yang kurang ini disebabkan oleh kekurangmampuan atau tidak dilibatkannya masyarakat dalam fungsi intermediasi dan penyebaran informasi sehingga masyarakat setempat seringkali diposisikan sebagai objek. Kondisi ini senada dengan hasil penelitian Herawati *et al.* (2010) pada kegiatan di hutan tanaman rakyat (HTR), penelitian Kusumedi dan Rizal (2010) pada pembangunan Kesatuan Pemangkuan Hutan di Maros, dan penelitian Rastogi *et al.* (2010) pada pengelolaan



Gambar 1 Matriks kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan TNDS.

*Corbett National Park* di India. Kepentingan yang tinggi dari masyarakat terhadap sumber daya alam terutama berkenaan dengan kepentingan ekonomi dan sosial budaya.

Masyarakat bergantung pada sumber daya alam di kawasan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat memanfaatkan air sungai yang melintasi Danau Sentarum sebagai sumber air minum, keperluan mandi, cuci, kakus, sumber pendapatan dari perikanan, untuk pertanian, sarana transportasi, serta pemanfaatan sumber daya hutan berupa kayu, kayu bakar, madu, dan hasil hutan nonkayu lainnya. Kepentingan masyarakat dalam pengelolaan TNDS yang lestari lebih dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat untuk menopang kelangsungan hidup mereka. Keempat pemangku kepentingan ini merupakan pemangku kepentingan yang penting, namun memerlukan pemberdayaan dalam proses pengelolaan TNDS. Masyarakat Melayu, Iban, Kantuk, dan Embalah masing-masing memiliki aturan-aturan dalam mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dalam rangka menjaga keberlanjutan hasil alam yang mereka jadikan sumber penghidupan. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan menempatkan masyarakat menjadi subjek kegiatan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lestari, minimal di daerah kelola masing-masing.

Isu yang mengikat terbentuknya APDS adalah kearifan lokal tentang *periau* yang mengelola *tikung* dan lingkungannya. Penduduk danau, secara turun temurun, telah mengelola madu hutan dalam organisasi tradisional yang disebut *periau* dengan aturan-aturan dan wilayah pengelolaan. Dengan demikian, APDS juga dapat berperan serta dalam mengelola TNDS agar lestari. Madu hutan di TNDS merupakan sumber daya potensial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di musim penghujan, pada saat pendapatan dari ikan rendah. Selain itu, madu hutan juga merupakan insentif yang baik untuk pemeliharaan hutan karena lebah madu hutan hanya dapat

menghasilkan madu hutan bila habitat lebah hutan terpelihara.

Posisi kuadran II (*key players*) hanya ditempati oleh BTNDS sebagai kelompok yang paling kritis karena memiliki kepentingan dan pengaruh yang sama-sama tinggi. BTNDS memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi berkenaan dengan otoritas dan tanggung jawab terbesar pengelolaan terhadap realisasi program kerja di kawasan TNDS yang mencakup kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan evaluasi. Hal ini lazim ditemui pada setiap proyek pengelolaan sumber daya alam, pengelola yang mendapat kekuasaan secara legal selalu menempati posisi sebagai pemangku kepentingan utama (Sembiring *et al.* 2010; Li *et al.* 2012; Maguire *et al.* 2012).

Posisi kuadran III (*context setter*) ditempati oleh SKPD Kabupaten Kapuas Hulu dan LSM. SKPD yang terlibat adalah BAPPEDA, dinas perkebunan dan kehutanan, dinas perikanan, dan dinas kebudayaan dan pariwisata, sedangkan LSM meliputi Riak Bumi dan WWF. Pemangku kepentingan ini dapat mempengaruhi pengelolaan TNDS karena memiliki pengaruh yang tinggi. SKPD merupakan wakil pemerintah daerah yang memiliki otoritas pengembangan wilayah. Era otonomi daerah memberikan wewenang lebih besar pada setiap daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan daerahnya masing-masing.

Ketika penelitian berlangsung, informasi yang diperoleh di seputar taman nasional dalam perspektif pemerintah tidak mencerminkan sebuah klaim sepihak untuk dikeluarkan sebuah kebijakan untuk mengambil alih atau meminta keikutsertaan pemda dalam mengelola TNDS. Hal ini dikarenakan minimnya sumber dana, sumber daya manusia, dan juga informasi dan data tentang TNDS. Selain itu, terjadi sedikit ketidakharmonisan hubungan koordinasi antara pemda dan BTNDS dikarenakan kedudukan BTNDS. BTNDS berkedudukan di Kabupaten Sintang, sedangkan kawasan TNDS berada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Akibatnya, antara pihak BTNDS dan pemda seringkali berselisih paham dalam kegiatan pengelolaan.

Garis batas wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah terindikasi dengan pemberian konsesi perkebunan yang berdekatan dengan kawasan TNDS. Meskipun wilayah atau lokasi perkebunan berada di luar kawasan yaitu di areal penggunaan lain (APL), akan tetapi resistensi dan pemboikotan terhadap bentuk eksploitasi lingkungan yang juga akan mengancam kondisi TNDS tidak dimunculkan. Posisi dan perilaku politik daerah serupa ini merefleksikan “benturan” antara 2 konsepsi besar terhadap sumber daya alam (TNDS). Pertama, bersentuhan dengan ekspektasi finansial kas daerah melalui sektor perkebunan (sisi ekonomi). Kedua, lebih menekankan kepada lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan (sisi ekologi).

Riak Bumi serta WWF memiliki pengaruh tinggi karena keduanya mampu memainkan posisi intermediasi dan penyebaran informasi antarpemangku kepentingan dengan baik. Khusus untuk Riak Bumi, LSM ini sudah bekerja di kawasan semenjak tahun 1997. Kerjasama yang dijalin dalam hal peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam yang ada pada wilayah kelolanya (wilayah adat) serta peningkatan sumber pendapatan masyarakat dari hasil anyaman (rotan), madu, damar, dan kerajinan lainnya. WWF sebagai lembaga internasional sudah biasa terlibat dalam kegiatan advokasi dan mediasi yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga cukup mempunyai pengaruh terhadap kegiatan pengelolaan. Kondisi serupa juga ditemui pada *Mecuburi Forest Reserve* di Mozambique yaitu LSM yang selalu mendampingi masyarakat dan memiliki pengaruh yang tinggi dalam proyek tersebut (Mushove & Vogel 2005).

Posisi pada kuadran IV (*crowd*) merupakan kelompok yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah dalam pengelolaan TNDS. Terdapat 6 pemangku kepentingan yang berada pada kuadran ini, yaitu FFI, Yayasan Titian, CIFOR, PRCF Indonesia, CANOPY, dan UNTAN. Keenam pemangku kepentingan ini memberikan perhatian juga dalam pengelolaan TNDS, namun karena kegiatan yang dilakukan hanya bersifat proyek dan waktu-waktu tertentu sehingga belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan pengelolaan. Lembaga-lembaga ini umumnya lebih menekankan pada satu kegiatan tertentu.

FFI dan Yayasan Titian menekankan kegiatannya pada pengawasan perdagangan ilegal fauna dan flora lintas negara sehingga masalah pengelolaan TNDS lebih terbatas hanya apabila terjadi kegiatan perdagangan ilegal terjadi. Selain itu, kedua lembaga ini baru bekerja di kawasan TNDS dalam waktu 5 tahun terakhir. CIFOR dan UNTAN berfokus pada kegiatan-kegiatan penelitian sehingga keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan belum begitu terasa kepentingan dan pengaruhnya. Hasil-hasil penelitian berupa rekomendasi terhadap pengelolaan TNDS seringkali tidak terpakai karena setelah seminar hasil penelitian dilakukan, seringkali rekomendasi tersebut terlupakan dan menjadi tumpukan laporan. Begitu juga dengan PRCF Indonesia yang bergerak pada kegiatan konservasi buaya senyulong dan fasilitator kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat, sementara CANOPY Indonesia yang baru bergabung dengan TNDS

dalam 2 tahun terakhir mendukung pengolahan bahan promosi TNDS.

Matriks kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan dapat berubah tipenya sepanjang waktu dan dampak perubahan tersebut perlu dipertimbangkan (Reed *et al.* 2009). Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini, tampaknya pengelolaan suatu kawasan konservasi tidak lagi mutlak ditangani oleh satu pihak yaitu BTNDS. Perlu pengembangan kemitraan dalam menjaga suatu kawasan konservasi dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan kawasan. Dengan demikian, keberlanjutan sumber daya TNDS dan keberlanjutan manfaat yang dapat diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan terutama masyarakat lokal dapat terlaksana dengan baik.

**Hubungan antarpemangku kepentingan** Teridentifikasi 3 hubungan yang terjadi antarpemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan TNDS yaitu potensi konflik, saling mengisi, dan bekerjasama. Potensi konflik kepentingan terjadi antara BTNDS dan pihak pemerintah daerah dalam hal pengelolaan TNDS. Taman nasional (TN) mempunyai peran yang penting dan strategis bagi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. TNDS mempunyai fungsi strategis sebagai areal tangkapan air, daerah aliran sungai (DAS), hidrologi (sumber air), mengatur iklim mikro, penyerap karbon, tempat pendidikan, dan sebagai tempat wisata alam. Secara garis besar terdapat 3 tujuan pengelolaan taman nasional yaitu: (1) perlindungan proses ekologis untuk menjamin fungsi dan perannya sebagai sistem penyangga kehidupan, (2) pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, dan (3) pemanfaatan secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan yang berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat sekitar TN. Ketiga tujuan ini sesuai dengan Undang-Undang No. 5/1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sehingga dalam pengelolaan TNDS selalu memperhatikan dimensi ekologis, ekonomis, dan sosial. Bagi pihak Kabupaten Kapuas Hulu, kawasan TNDS merupakan salah satu kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan lingkungan dan ekonomi. Potensi konflik terjadi karena walaupun kedua belah pihak memperhatikan aspek lingkungan dan ekonomi, namun pengelolaan oleh pihak BTNDS lebih berat ke arah lingkungan, sementara pihak pemda lebih ke arah ekonomi.

Pemda bergerak berdasarkan Undang-Undang No. 32/2004 mengenai Pemerintah Daerah tentang pengelolaan sumber daya alam sehingga timbul paradigma terhadap TN yang berada di daerah yaitu TN merupakan sumber daya yang potensial, dapat dieksploitasi, dan dapat memberikan pemasukan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Kewenangan tersebut dianggap sebagai bagian dari kebebasan daerah otonom untuk memperoleh dana yang sebenarnya dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkannya. Fakta bahwa pemberian izin untuk membuka perkebunan di sekitar kawasan TNDS tetap dilakukan menunjukkan ketidakpedulian terhadap lingkungan tetapi lebih mementingkan aspek ekonomi. Pihak pemda mengemukakan bahwa izin perkebunan yang diberikan bukan di kawasan TNDS tetapi di APL, padahal

sebagai suatu ekosistem tentulah kawasan sekitar tersebut juga akan mempengaruhi ekosistem yang ada di TNDS.

Terdapat pula konflik antara BTNDS dan masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan lingkungan dan kepentingan ekonomi. Selama ini dianggap 2 kepentingan tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat berjalan selaras, padahal seharusnya antara konservasi lingkungan dan kepentingan ekonomi dapat berjalan selaras untuk dapat melestarikan sumber daya alam. Darusman dan Widada (2004) menyebutkan 5 prinsip yang menegaskan sinergisitas antara kegiatan konservasi dan pembangunan ekonomi. Pada prinsip kedua dinyatakan bahwa ekonomi merupakan landasan pembangunan konservasi yang berkelanjutan, tanpa adanya manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan dapat dipastikan program konservasi akan terhenti karena masyarakat tidak peduli. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sosial masyarakat TNDS yang telah memiliki aturan-aturan dalam pengelolaan sumber daya alam yang semuanya mengarah pada pelestarian sumber daya alam. Sebagai contoh, masyarakat nelayan telah memiliki aturan tertulis mengenai tata cara menangkap ikan di kawasan danau. Contoh lain, *periau* memiliki aturan-aturan dalam cara pemanenan madu. Pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat sebenarnya merupakan suatu modal yang bila dapat diadopsi dan diberdayakan merupakan suatu peluang untuk melakukan pengelolaan bersama dengan pihak yang berbeda kepentingan dalam menjaga kelestarian kawasan.

Antarmasyarakat juga terdapat potensi konflik. Antara masyarakat nelayan/melayu yang tinggal di dalam kawasan dan masyarakat dayak/peladang yang tinggal di sekitar kawasan. Hal ini disebabkan oleh budaya masyarakat dayak yang menangkap ikan di pinggir sungai menggunakan tuba/racun. Menurut masyarakat melayu, hal ini menyebabkan kematian ikan karena racun dapat merusak habitat ikan di dalam kawasan. Disisi lain, masyarakat dayak mengklaim bahwa tuba yang digunakan berasal dari bahan alam sehingga tidak akan merusak habitat ikan dan cara ini sudah dilakukan sejak dahulu. Saat penelitian terungkap juga bahwa bahan alami untuk membuat racun sudah semakin habis dan sulit ditemukan sehingga kemungkinan penggunaan racun kimia memang terjadi. Selain itu, racun kimia semakin mudah diperoleh di pasaran dengan harga relatif terjangkau. Konflik ini tampaknya sudah dicarikan jalan keluarnya melalui pertemuan masyarakat TNDS, namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Diduga hal ini terjadi karena semakin melemahnya institusi adat yang ada dan tuntutan ekonomi yang semakin tinggi.

Konflik kepentingan antara BTNDS dan LSM dan lembaga penelitian bisa dikatakan hampir tidak ada karena umumnya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut mendukung pengelolaan yang dilakukan oleh BTNDS sehingga hubungan yang terjadi adalah saling mengisi dan bekerja sama. Hal ini juga disebabkan LSM dan BTNDS memiliki cara pandang yang sama dalam pengelolaan TNDS yaitu memprioritaskan kepentingan kelestarian lingkungan.

Hubungan saling mengisi dapat dilihat pada institusi LSM/yayasan/lembaga yang telah menjadi mitra TNDS, yaitu: LSM Riak Bumi (khusus peningkatan dan

pengembangan kapasitas masyarakat di TNDS), WWF & HOB Indonesia (dalam pengelolaan koridor TNDS dengan TNBK serta program HOB), FFI dan Yayasan Titian (kerjasama dalam pengawasan perdagangan ilegal fauna dan flora lintas negara), CIFOR (penelitian pengembangan sumber perekonomian masyarakat), PRCF Indonesia (konservasi buaya senyulong dan fasilitator kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat), dan CANOPY Indonesia (mendukung pengolahan bahan promosi TNDS).

Sebenarnya, kerja sama dengan sebagian masyarakat, tokoh masyarakat, LSM lokal, dan LSM yang ada di Pontianak serta Pemda Kapuas Hulu juga sudah dilakukan oleh BTNDS, yaitu berupa:

- 1 Diskusi dan seminar untuk mendapatkan solusi/pemecahan masalah dan usaha yang dapat dilaksanakan atau ditindaklanjuti untuk hal tersebut.
- 2 Forum-forum kajian dan deklarasi bersama untuk pelestarian kawasan TNDS
- 3 Pendampingan dalam *capacity building* masyarakat.

Sampai saat ini belum menampakkan hasil yang memuaskan karena pengelolaan masih dipegang penuh oleh BTNDS. Namun demikian, semua pemangku kepentingan yang terlibat dengan pengelolaan TNDS umumnya merupakan pihak yang berkepentingan dengan kelestarian kawasan karena pihak tersebut mempunyai kepentingan terhadap keberadaan kawasan. Berdasarkan hal tersebut, berarti terdapat potensi untuk bekerja sama di antara pemangku kepentingan tersebut. Manajemen kolaboratif sendiri sudah menjadi salah satu kebijakan yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang menjadi salah satu acuan pengelolaan di TNDS. Sampai saat penelitian berlangsung, pengelolaan kolaboratif dalam TNDS terus digagas, namun belum dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pengelolaan kolaboratif mencakup kepentingan banyak pihak, baik dalam tataran pemerintah, pemda, dunia usaha, dan masyarakat. Bisa dikatakan, manajemen kolaboratif bukanlah pendekatan yang mudah diterapkan dan efektif untuk semua kondisi dan keadaan. Perlu keseriusan dari semua pemangku kepentingan yang terlibat untuk dapat mencapai pengelolaan kolaboratif dalam kawasan TNDS yang lebih baik dan dapat mencapai tujuan pengelolaan yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan.

## Kesimpulan

Pengelolaan TNDS perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai kepentingan dan pengaruh dengan kawasan TNDS. Sebagai sumber daya alam publik, keberadaan TNDS memang menyangkut kepentingan banyak pihak. Pengelolaan tunggal dan masih sentralistik yang dilakukan pihak BTNDS terbukti tidak dapat mencapai tujuan pembentukan TNDS. Untuk itu, sudah saatnya dilakukan pengelolaan secara bersama dengan pemangku kepentingan yang terlibat untuk membangun suatu kolaborasi pengelolaan. Dalam membangun kolaborasi tersebut perlu memperhatikan hubungan-hubungan antarpemangku kepentingan yang meliputi: (1) hubungan yang saling menguntungkan dan

dibuat untuk mencapai tujuan bersama, (2) hubungan ini meliputi komitmen, tanggung jawab, memiliki otoritas dan akuntabilitas, dan berbagi sumber daya dan manfaat, dan (3) hubungan berupa komitmen organisasi dari para pemimpin masing-masing pemangku kepentingan. Konflik yang terjadi perlu dikelola sehingga tidak mengarah ke konflik yang lebih tajam, tetapi dapat dikurangi dengan melakukan mediasi dan koordinasi di antara pihak-pihak yang berkonflik. Ego antara kepentingan pelestarian lingkungan dan ekonomi dapat diselaraskan jika pihak-pihak yang berkonflik mau berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga kepentingan konservasi dan ekonomi dapat saling mendukung bukan untuk dipertentangkan. Hubungan saling mengisi dan kerjasama yang sudah dilakukan harus terus dipelihara dan ditingkatkan sehingga pengelolaan kawasan yang lestari dan memberikan manfaat bagi masyarakat dapat dicapai. Untuk mencapai hal ini diperlukan waktu, dedikasi, upaya serius dalam keterlibatan sosial, dan niat baik dan tulus dari semua pihak untuk dapat berkolaborasi dalam mengelola kawasan TNDS dan sekitarnya.

#### Daftar Pustaka

- Abbas R. 2005. Mekanisme perencanaan partisipasi *stakeholder* Taman Nasional Gunung Rinjani [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- [BTNDS] Balai Taman Nasional Danau Sentarum. 2011. *Data Statistik Balai Taman Nasional Danau Sentarum Tahun 2010*. Sintang: Balai Taman Nasional Danau Sentarum.
- Darusman D, Widada. 2004. *Konservasi dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: JICA-Ditjen PHKA Departemen Kehutanan.
- Fletcher A, Guthrie J, Steane P, Roos G, Pike S. 2003. Mapping stakeholder perception for a third sector organization. *Journal of Intellectual Capital* 4(4):505–527 . <http://dx.doi.org/10.1108/14691930310504536>.
- Giesen W, Aglionby J. 2000. Introduction to Danau Sentarum National Park, West Kalimantan. *Borneo Research Bulletin* 31:528.
- Herawati T, Widjayanto N, Saharuddin, Eriyatno. 2010. Analisis respon pemangku kepentingan di daerah terhadap kebijakan hutan tanaman rakyat. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 7(1):13–25.
- Kusumedi P, Rizal A. 2010. Analisis *stakeholder* dan kebijakan pembangunan KPH model Maros di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 7(3):179–193.
- Li THY, Ng ST, Skitmore M. 2012. Conflict or consensus: an investigation of stakeholder concerns during the participation process of major infrastructure and construction projects in Hong Kong. *Habitat International* 36:333–342. <http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2011.10.012>.
- Maguire B, Potss J, Fletcher S. 2012. The role of stakeholders in themarine planning process-stakeholder analysis within the Solent, United Kingdom. *Marine Policy* 36:246–257. <http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2011.05.012>.
- Mushove P, Vogel C. 2005. Heads or tails? Stakeholder analysis as a tool for conservation area management. *Global Environmental Change* 15:184–198. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2004.12.008>.
- Olsson P, Folke C, Hahn T. 2004. Social-ecological transformation for ecosystem management: the development of adaptive co-management of a wetland landscape in southern Sweden. *Ecology and Society* 9(4):2.
- Rastogi A, Badola R, Hussain SA, Hickey GM. 2010. Assessing the utility of stakeholder analysis to protected areas management: the case of Corbett National Park, India. *Biological Conservation* 143:2956–2964. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2010.04.039>.
- Reed MS, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Huback K, Morris J, Prell CH, Quin CH, Stringer LC. 2009. Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resources management. *Journal of Environmental Management* 30:1–17.
- Schmeer K. 2000. *Stakeholder Analysis Guidelines. Policy Toolkit for Strengthening Health Sector Reform*. Washington DC: Regional Office of the World Health Organization.
- Sembiring E, Basuni S, Soekmadi R. 2010. Resolusi konflik pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Teluk Wondama. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 16(2):84–91.
- Sundawati L, Sanudin. 2009. Analisis pemangku kepentingan dalam upaya pemulihan ekosistem daerah tangkapan air Danau Toba. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 15(3):102–108.
- Varvasovszky Z, Brugha R. 2000. A stakeholder analysis. *Health Policy Plan* 15(3):338–345. <http://dx.doi.org/10.1093/heapol/15.3.338>.